Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP)

DINAS SOSIAL

Tahun 2024

DINAS SOSIAL

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS SOSIAL merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS SOSIAL Tahun 2024 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS SOSIAL. Kinerja DINAS SOSIAL diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh

jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS SOSIAL pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 24 Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGKALAN

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730126 199302 1 001

PARAF KOORDINASI		
NAMA	JABATAN	PARAF
IWAN SETYAWAN, AP, MM	SEKRETARIS	
DIDIK YANUARDI, SP	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	
AGUS HARYONO, SE. M.Si	Plt. KABID REHABILITASI SOSIAL	
MOHAMMAD AMINULLAH, S.Psi	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
ENDANG RETNO SOERJANI, SAP	KABID PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 4
D. Landasan Hukum 5
E. Sistematika 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis 8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

A. Capaian Kinerja Organisasi 23
B. Realisasi Anggaran 41
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 48

BAB IV PENUTUP 55

LAMPIRAN
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS SOSIAL selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS SOSIAL diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2016 Nomor 1/D) dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

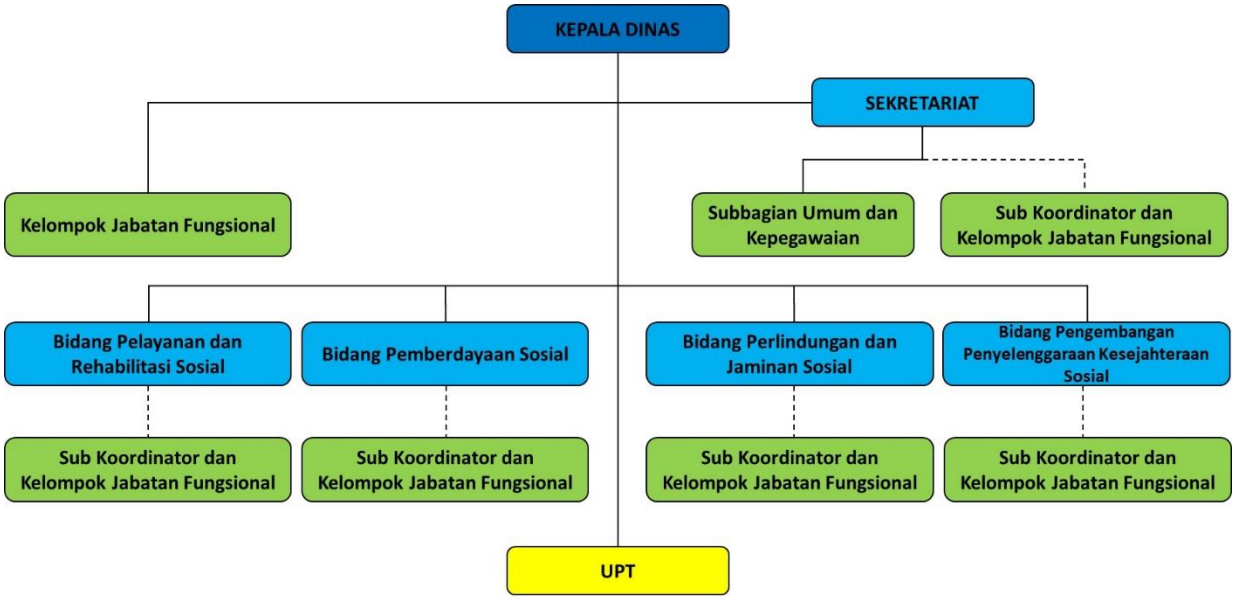

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS SOSIAL periode 2024-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan penerapan SPM urusan sosial sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
3. Kompleksitas permasalahan PMKS/PPKS yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektoral (sesuai

dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin)

4. Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra DINAS SOSIAL periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan penerapan SPM urusan sosial sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota
2. Peningkatan layanan sosial terintegrasi berbasis data
3. Peningkatan koordinasi daan kerja sama dengan lembaga lain/lintas sektor dalam penanganan PPKS.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 1/D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 / E);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E);
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 14/E);
8. Peraturan Bupati Bangkalan No. 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA

	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS SOSIAL adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS SOSIAL. Rencana Strategis DINAS SOSIAL yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS SOSIAL dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS SOSIAL tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra DINAS SOSIAL telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS SOSIAL merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS SOSIAL dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS SOSIAL tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS SOSIAL dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS SOSIAL sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

DINAS SOSIAL

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun		
			2024	2025	2026
T1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22%	7,69%	9,16%
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100	100	100
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial	13	14	15

S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75	88,5	90
		Nilai SAKIP	61,4	61,5	61,6

Sumber: Renstra DINAS SOSIAL periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

DINAS SOSIAL

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
A	Meningkatkan PPKS yang tertangani		Persentase PPKS yang tertangani	persentase	Mengukur persentase PPKS yang tertangani (mendapatkan pelayanan sosial)	Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah PPKS yang dilaporkan x 100%	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial;
1		Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	1.1 Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	persentase	Mengukur rata-rata capaian SPM urusan sosial kewenangan Kabupaten/kota	$\frac{X1+X2+...+Xn}{n}$ X = jumlah capaian SPM Urusan Sosial kewenangan kabupaten/kota; n = Jumlah data	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2		Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) dalam penyelenggaraan	2.1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam	persentase	Mengukur persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan

		kesejahteraan sosial		penyelenggaraan kesejahteraan sosial		kesejahteraan sosial	dibagi Jumlah Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaporkan x 100	dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial; 4. Bidang Pengembangan Sosial
3		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Hasil kuesioner/ survey kepuasan masyarakat	Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kab. Bangkalan
			3.2	Nilai SAKIP	Nilai	Mengukur tingkat Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

DINAS SOSIAL

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	1.1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	prosentase	100,00
		1.2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	prosentase	13
		1.3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87,75
				Nilai SAKIP	Nilai	61,4

Sumber: Rencana Kerja DINAS SOSIAL tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS SOSIAL Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Kepala DINAS SOSIAL Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100
2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75
		Nilai SAKIP	61,4

Sumber: Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS SOSIAL:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan DINAS SOSIAL Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**indeks**
A.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana***	**100**	**%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	orang/bulan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan
C.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***	***100***	***%***

6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14	Laporan
D.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	***100***	***%***
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen
E.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	Paket
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12	Paket
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	Dokumen
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Laporan
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan

F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan
G.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	***100***	***%***
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	44	Unit
II.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**13**	%
H.	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina***	***30***	***PSKS***
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Orang

23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Keluarga
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Lembaga
III.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100**	**%**
I.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***	***Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	**1260**	orang
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1.260	orang
J.	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***	***Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	***585***	***orang***
26	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500	orang
27	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	85	orang

IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**%**
K.	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi***	***100***	**%**
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3.000	orang
29	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.398	keluarga
30	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Keluarga
V.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**
L.	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya***	***100***	**%**
31	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6.165	orang
M.	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***	***Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi***	***100***	**%**
32	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	29	orang
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	**%**

N.	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***	***Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara***	***1***	Unit
33	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	makam
34	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	laporan

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DINAS SOSIAL Tahun 2024

Untuk mendukung rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, perlu adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran kegiatan tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 7.731.627.026 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp. 4.206.172.976
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.832.901.430
c. Belanja Hibah Rp. 62.500.000
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 805.639.500
e. Belanja Modal Rp. 4.413.120

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS SOSIAL selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS SOSIAL yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS SOSIAL.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS SOSIAL dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DINAS SOSIAL.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS SOSIAL juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah **pengukuran kinerja** dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Secara teknis, Persentase Capaian Target pada laporan kinerja menggunakan dua jenis rumus dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi.

Penggunaan **Rumus I** ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear, sebagai berikut:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Rencana}} \times 100\%$$

Penggunaan **Rumus II** ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:

$$\textit{Persentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \; x\ 100\%$$

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS SOSIAL tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

DINAS SOSIAL Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
T1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22	6,22	100	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial

S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13	13,18	101,00	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Linjamsos, Bidang Pemberdayaan sosial dan Bidang Pengembangan Sosial
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75	87,75	100	Sangat Tinggi	Aplikasi Sukma Jatim
		Nilai SAKIP	61,4	61,4	100	Sangat Tinggi	LHE dari Inspektorat

Tujuan #1 Meningkatkan PPKS yang tertangani

Realisasi Tujuan #1 pada tahun sebesar 6,22% dari 6,22% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja tujuan #1:

1) Realisasi target penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD tahun 2024 sebanyak 530 orang dari 600 orang penyandang disabilitas yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 88,33% (530/600 x 100). Sedangkan yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Tahun 2024 sebanyak 379 orang. Total penyandang disabilitas yang tertangani selama tahun 2024 adalah 909 orang.
2) Realisasi target anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD tahun 2024 sebanyak 346 orang dari 360 anak terlantar yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 96,11% (346/360 x 100). Sedangkan yang bersumber dari APBN tahun 2024 sebanyak 51 orang. Total anak terlantar yang tertangani selama tahun 2024 adalah 397 orang.
3) Realisasi target lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD pada tahun 2024 sebanyak 284 orang dari 300 orang lanjut usia terlantar yang direncanakan. Sehingga persentase

capaian adalah 94,66% (284/300 x 100). Sedangkan yang bersumber dari APBN tahun 2024 sebanyak 132 orang. Total lansia yang tertangani selama tahun 2024 adalah 416 orang.

4) Realisasi target tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial (reunifikasi, rujukan) pada tahun 2024 sebanyak 85 orang dari 85 orang tuna sosial yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% (85/85 x 100)
5) Realisasi target fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (bansos uang) pada tahun 2024 sebanyak 1.398 orang fakir miskin dari 1.398 orang fakir miskin yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% (1398/1398 x 100)
6) Realisasi target KPM yang mendapat bansos yang bersumber dari DBHCHT pada tahun 2024 sebanyak 36 Keluarga dari 40 Keluarga yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 90% (36/40 x 100)
7) Realisasi target program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 441 orang dari 441 orang yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% (441/441x100).
8) Jumlah korban bencana alam (*gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung, dan atau kekeringan*) yang terdata pada dan difasilitasi bantuan sosial tahun 2024 sebanyak 83 orang korban puting beliung dan 6165 orang terdampak banjir yang difasilitasi permakanan (dapur umum). Total Korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2024 sebanyak 6248 orang.
9) Jumlah korban bencana sosial (*konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan gedung, wabah/epidemic, gagal teknologi dan atau kebakaran hutan dan lahan*) terdata pada tahun 2024 sebanyak 15 orang, dan korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2024 sebanyak 15 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100 % (15/15 x 100)
10) Daerah rawan kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih pada tahun 2024 sebanyak 19 desa di 6 Kecamatan Kabupaten Bangkalan.

Formula yang dipakai: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang dilaporkan}} \times 100\%$

= (9.942/159.738) x 100
= 6,22%

Sasaran #1 Meningkatnya capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan sosial

Realisasi sasaran #1 pada tahun 2024 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja sasaran #1:

1) Realisasi target penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD tahun 2024 sebanyak 530 orang dari 600 orang penyandang disabilitas yang direncanakan. Persentase capaian adalah 88,33% (530/600 x 100). Kekurangan pencapaian kinerja sebanyak 70 orang ini terpenuhi dengan adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi. Sehingga di pelaporan E-SPM Kemendagri indeks pencapaian kinerjanya mencapai 100%.
2) Realisasi target anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD tahun 2024 sebanyak 346 orang dari 360 anak terlantar yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 96,11% (346/360 x 100). Kekurangan pencapaian kinerja sebanyak 14 orang ini terpenuhi dengan adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi. Sehingga di pelaporan E-SPM Kemendagri indeks pencapaian kinerjanya mencapai 100%.
3) Realisasi target lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berupa bantuan sosial uang yang bersumber dari APBD pada tahun 2024 sebanyak 284 orang dari 300 orang lanjut usia terlantar yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 94,66% (284/300 x 100). Kekurangan pencapaian kinerja sebanyak 16 orang ini terpenuhi dengan adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Sehingga di pelaporan E-SPM Kemendagri indeks pencapaian kinerjanya mencapai 100%.
4) Realisasi target tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial (reunifikasi,

rujukan) pada tahun 2024 sebanyak 113 orang dari 113 orang tuna sosial yang direncanakan. Sehingga persentase capaian adalah 100% (113/113 x 100)

5) Jumlah korban bencana alam (*gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrem, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung, dan atau kekeringan*) yang terdata pada dan difasilitasi bantuan sosial tahun 2024 sebanyak 83 orang korban puting beliung dan 6165 orang terdampak banjir yang difasilitasi permakanan (dapur umum). Total Korban bencana alam yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2024 sebanyak 6248 orang.
6) Jumlah korban bencana sosial (*konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan gedung, wabah/epidemic, gagal teknologi dan atau kebakaran hutan dan lahan*) terdata pada tahun 2024 sebanyak 15 orang, dan korban bencana sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya pada tahun 2024 sebanyak 15 orang. Sehingga persentase capaian adalah 100 % (15/15 x 100)
7) Daerah rawan kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih pada tahun 2024 sebanyak 19 desa di 6 Kecamatan Kabupaten Bangkalan.

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran:

$$= \frac{X1+X2+X3+X4+X5}{5}$$

= (100+100+100+100+100/5)

= 100%

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Penanganan Bencana

Sasaran #2 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran:

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina [dibagi] Jumlah

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdata [dikalikan] 100

= (65/493) x 100

= 13,18%

Realisasi sasaran #2 pada tahun 2024 mencapai 13,2 % dari 13% yang ditargetkan atau persentase capaian 101%

Variabel Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pendukung pencapaian target kinerja sasaran:

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 sebanyak 18 orang
2. Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial pada tahun 2024 sebanyak 29 orang
3. Jumlah Pelopor Perdamaian yang dibina pada tahun 2024 sebanyak 4 orang.
4. Jumlah Pekerja Sosial yang dibina pada tahun 2024 sebanyak 2 orang.
5. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan karang taruna yang dibina dan dibantu pada tahun 2024 sebanyak 12 lembaga.
6. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 233 lembaga
7. Jumlah karang taruna yang terdata pada tahun 2024 sebanyak 21 karang taruna

Jadi Jumlah PSKS yang yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 sebanyak 18 orang TKSK, 29 orang Tagana, 4 orang Pelopor Perdamaian, 2 orang Pekerja sosial dan 12 lembaga. Target capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 adalah 13%, dan terealisasi sebesar 13,18% sehingga persentase capaian adalah 101 % (13,18/13x 100)

Program yang mendukung terwujudnya sasaran ini adalah: Program Pemberdayaan Sosial

Tahun 2024 ini adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial 2024 - 2026 dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun analisis capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. **Membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut** :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
T1	**Meningkatkan PPKS yang tertangani**	**Persentase PPKS yang tertangani**	**8,58**	**6,22**	**6,22**	**100**
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	98,1	100	100	100,00
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	21,92	13	13,18	101,42
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,99	87,75	87,75	100,00
		Nilai SAKIP	61,2	61,4	61,4	100,00

Dari tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa realisasi Tujuan #1 dan sasaran #2 pada tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penentuan target tujuan dan sasaran pada renstra 2024 -2026 dibanding renstra 2018 – 2023. Sedangkan realisasi Sasaran #1 dan Sasaran #3 menunjukkan tren kenaikan. Hal

ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan PPKS dan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial berbasis data.

2. **Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial periode 2024 – 2026 diuraikan pada tabel berikut** :

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2024 - 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2024 thd Target Akhir Renstra (%)
1	2	3	4	5	6=4/5*100
T1	**Meningkatkan PPKS yang tertangani**	**Persentase PPKS yang tertangani**	**6,22**	**9,16**	**67,90**
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100	100	100,00
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13,18	15	87,87
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75	90	97,50
		Nilai SAKIP	61,4	61,6	99,68

3. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut**:

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Realisasi SPM Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100

2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	100	100	100
Rata-rata capaian SPM Bidang Sosial					100	

Secara umum capaian SPM Bidang Sosial masuk kategori sangat tinggi, yaitu mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi. Sehingga di pelaporan E-SPM Kemendagri, indeks pencapaian SPM urusan sosial mencapai 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
T1	**Meningkatkan PPKS yang tertangani**	**Persentase PPKS yang tertangani**	**6,22**	**6,22**	**100**	Kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	100	100	100	Kerja sama lintas sektor dan validasi data PPKS yang terus dilakukan secara bertahap	
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13	13,18	101,38	Semakin meningkatnya SDM Kesejahteraan Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,75	87,75	100		
		Nilai SAKIP	61,40	61,40	100		

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tujuan maupun sasaran masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah semakin meningkatnya kerja sama lintas sektor dan sudah dilakukannya verval mandiri secara bertahap mulai tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi sidaya sehati sebagai basis data dalam penanganan PPKS.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

`Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
T 1	**Meningkatkan PPKS yang tertangani**	**Persentase PPKS yang tertangani**	**100**				
1	**Meningkatnya capaian SPM urusan sosial**	**Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial**	**100**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**93,93**	**Menunjang**
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	***Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	92,06	Menunjang
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	92,06	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	***Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	97,95	Menunjang
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	97,60	Menunjang

				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	99,91	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi***	**99,91**	**Menunjang**
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100,00	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90,00	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya**	99,63	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya***	**99,63**	**Menunjang**
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	***Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi***	100,00	Menunjang

				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	Menunjang
	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**101**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100**	**Menunjang**
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina***	100	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	***Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara***	100	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100	Menunjang

				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100	Menunjang
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	1. Indeks Kepuasan Masyarakat ; 2. Nilai SAKIP	100	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**Menunjang**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana***	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi***	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***	100	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	Menunjang

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	100	Menunjang
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100	Menunjang
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	Menunjang

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	Menunjang

Dari tabel 3.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung tercapainya **Tujuan #1 Meningkatkan PPKS yang tertangani** yaitu Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana. Sasaran #1 **Meningkatnya capaian SPM Urusan Bidang Sosial** yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #2 **Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial** yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Program yang mendukung tercapainya sasaran #3 **Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja, Anggaran Program dan Kegiatan

No	Pogram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Realisasi		% Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**indeks 100**	**5.062.559.146**	**indeks 100**	**4.966.038.700**	**100,00**	**98,09**
A.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana***	**100 %**	***1.554.600***	**100 %**	***1.501.250***	***100,00***	***96,57***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.074.500	2 Dokumen	1.065.250	100,00	99,14
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	480.100	1 Laporan	436.000	100,00	90,81
B.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi***	**100 %**	***3.938.504.476***	**100 %**	***3.898.651.319***	***100,00***	***98,99***

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/ bulan	3.936.782.976	39 orang/ bulan	3.896.952.569	100,00	98,99
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	608.700	1 Laporan	596.750	100,00	98,04
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	1.112.800	18 Laporan	1.102.000	100,00	99,03
C.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun***	**100 %**	***496.500***	**100 %**	***481.500***	***100,00***	***96,98***
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	283.700	1 Dokumen	269.000	100,00	94,82
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	212.800	14 Laporan	212.500	100,00	99,86
D.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana***	**100 %**	***472.100***	**100 %**	***471.500***	***100,00***	***99,87***
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	472.100	12 Dokumen	471.500	100,00	99,87
E.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**	***105.800.090***	**100 ,00 %**	***103.667.062***	***100,00***	***97,98***
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	1.105.976	2 Paket	1.096.000	100,00	99,10

10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	34.928.554	12 Paket	33.498.700	100,00	95,91
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	2.832.300	12 Paket	2.817.000	100,00	99,46
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12.951.000	12 Paket	12.941.000	100,00	99,92
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	5.343.260	12 Paket	5.342.750	100,00	99,99
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	9.520.000	12 Dokumen	8.970.000	100,00	94,22
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	8.925.000	40 Laporan	8.906.000	100,00	99,79
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	30.194.000	20 Laporan	30.095.612	100,00	99,67
F.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**	***970.364.380***	**100 %**	***920.999.869***	***100,00***	***94,91***
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	97.714.380	12 Laporan	85.475.426	100,00	87,47
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	872.650.000	12 Laporan	835.524.443	100,00	95,75
G.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana***	**100 %**	***45.367.000***	**100 %**	***40.266.200***	***100,00***	***88,76***
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	26.352.000	15 Unit	23.054.100	100,00	87,49

	Kendaraan Dinas Jabatan							
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	8.040.000	5 Unit	6.312.100	100,00	78,51
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	44 Unit	10.975.000	44 Unit	10.900.000	**100,00**	99,32
II.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**13 %**	**248.580.400**	**13,00 %**	**238.126.250**	**100,00**	**95,79**
H.	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina***	***30 PSKS***	***248.580.400***	***30,00 PSKS***	***238.126.250***	***100,00***	***95,79***
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	130.783.000	18 Orang	128.962.000	100,00	98,61
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Keluarga	60.297.400	500 Keluarga	51.692.500	100,00	85,73
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	57.500.000	12 Lembaga	57.471.750	100,00	99,95

III.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100 %**	**1.126.951.330**	**93,93 %**	**1.067.833.645**	**93,93**	**94,75**
I.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***	***Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	***1260 orang***	***288.859.750***	***1160 orang***	***268.308.250***	***92,06***	***92,89***
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	1260 orang	288.859.750	1160 orang	268.308.250	92,06	92,89
J.	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***	***Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti***	***585 orang***	***838.091.580***	***573 orang***	***799.525.395***	***97,95***	***95,40***
26	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	746.099.100	488 orang	708.171.965	97,60	94,92

27	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	85	orang	91.992.480	85	orang	91.353.430	100,00	99,31
IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**persentase penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial**	**100**	**%**	**646.560.000**	**99,91**	**%**	**605.965.500**	**99,91**	**93,72**
K.	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi***	***100***	***%***	***646.560.000***	***99,91***	***%***	***605.965.500***	***99,91***	***93,72***
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	3000	orang	215.000.000	3000	orang	183.121.000	100,00	85,17
29	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1398	keluarga	351.560.000	1398	keluarga	350.086.000	100,00	99,58
30	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Keluarga	80.000.000	36	Keluarga	72.758.500	90,00	90,95
V.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya**	**100**	**%**	**585.000.000**	**99,63**	**%**	**420.975.590**	**99,63**	**71,96**
L.	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	***Persentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya***	***100***	***%***	***550.000.000***	***99,63***	***%***	***409.661.590***	***99,63***	***74,48***
31	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6165	orang	550.000.000	6165	orang	409.661.590	100,00	74,48

		Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	582	orang	550.000.000	557	orang		
M.	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***	***Persentase Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang difasilitasi***	***100***	***%***	***35.000.000***	***100,0***	***%***	***11.314.000***	**100,00**	***32,33***
32	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	29	orang	35.000.000	29	orang	11.314.000	100,00	32,33
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola**	**100**	**%**	**61.976.150**	**100**	**%**	**61.868.944**	**100,00**	**99,83**
N.	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***	***Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara***	***1***	***Unit***	***61.976.150***	***1***	***Unit***	***61.868.944***	**100,00**	***99,83***
33	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	50	makam	25.800.000	50	makam	25.793.944	100,00	99,98
34	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	laporan	36.176.150	2	laporan	36.075.000	100,00	99,72
	JUMLAH				**7.731.627.026**			**7.360.808.629**		**95,20**

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.731.627.026 yang bersumber dari APBD kabupaten Bangkalan dan terealisasi sebesar Rp. 7.360.808.629.

Secara kumulatif capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 (95,20%) mengalami kenaikan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada Tahun 2023 (89,65%).

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9 = 5-8
T1	**Meningkatkan PPKS yang tertangani**	**6,22**	**6,22**	**100,00**	**2.358.511.330**	**2.094.774.735**	**88,82**	**11,18**
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	100,00	100,0	100	930.852.230	769.323.270	82,65	17,35
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	13	13,18	101	310.556.550	299.995.194	96,60	4,79
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	87,75	87,75	100	5.062.559.146	4.966.038.700	98,09	1,91
		61,40	61,40	100				

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus: **% capaian kinerja - % capaian anggaran**
Semakin tinggi hasil perhitungannya, semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu.

Jika Output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah *persentase capaian kinerja*, sedangkan inputnya adalah *persentase realisasi anggaran*.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.9 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Tujuan #1: Meningkatkan PPKS yang tertangani dengan indikator persentase PPKS yang tertangani, persentase capaian kinerjanya 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 88,82%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber

daya sebesar 11,18%.

b. Sasaran meningkatnya capaian SPM urusan sosial dengan indikator nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial, persentase capaian kinerjanya 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 82,65%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,35%.

c. Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, persentase capaian kinerja 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 96,60%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,79%.

d. Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai SAKIP dengan persentase capaian kinerja masing-masing 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 98,09%. Sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 1,91%.

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Pogram / Kegiatan	Target		Realisasi		% Capaian		Tingkat Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	4	5	6	7	8 = 6/4	9 = 7/5	10 = 8 -9
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 indeks**	**5.062.559.146**	**100,00 indeks**	**4.966.038.700**	**100,00**	**98,09**	**1,91**
A.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100 %***	***1.554.600***	***100 %***	***1.501.250***	***100,00***	***96,57***	***3,43***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.074.500	2 Dokumen	1.065.250	100,00	99,14	0,86

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	480.100	1 Laporan	436.000	100,00	90,81	9,19
B.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	***3.938.504.476***	**100 %**	***3.898.651.319***	***100,00***	***98,99***	***1,01***
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	3.936.782.976	39 orang/bulan	3.896.952.569	100,00	98,99	1,01
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	608.700	1 Laporan	596.750	100,00	98,04	1,96
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18 Laporan	1.112.800	18 Laporan	1.102.000	100,00	99,03	0,97
C.	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**100 %**	***496.500***	**100 %**	***481.500***	***100,00***	***96,98***	***3,02***
6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	283.700	1 Dokumen	269.000	100,00	94,82	5,18
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	14 Laporan	212.800	14 Laporan	212.500	100,00	99,86	0,14
D.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100 %**	***472.100***	**100 %**	***471.500***	***100,00***	***99,87***	***0,13***
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	472.100	12 Dokumen	471.500	100,00	99,87	0,13
E.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**	***105.800.090***	**100,00 %**	***103.667.062***	***100,00***	***97,98***	***2,02***
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	1.105.976	2 Paket	1.096.000	100,00	99,10	0,90
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	34.928.554	12 Paket	33.498.700	100,00	95,91	4,09
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	2.832.300	12 Paket	2.817.000	100,00	99,46	0,54
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12.951.000	12 Paket	12.941.000	100,00	99,92	0,08

13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	5.343.260	12	Paket	5.342.750	100,00	99,99	0,01
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Dokumen	9.520.000	12	Dokumen	8.970.000	100,00	94,22	5,78
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	Laporan	8.925.000	40	Laporan	8.906.000	100,00	99,79	0,21
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	30.194.000	20	Laporan	30.095.612	100,00	99,67	0,33
F.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100**	**%**	***970.364.380***	**100**	**%**	***920.999.869***	***100,00***	***94,91***	***5,09***
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	97.714.380	12	Laporan	85.475.426	100,00	87,47	12,53
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	872.650.000	12	Laporan	835.524.443	100,00	95,75	4,25
G.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100**	**%**	***45.367.000***	**100**	**%**	***40.266.200***	***100,00***	***88,76***	***11,24***
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15	Unit	26.352.000	15	Unit	23.054.100	100,00	87,49	12,51
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	8.040.000	5	Unit	6.312.100	100,00	78,51	21,49
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44	Unit	10.975.000	44	Unit	10.900.000	**100,00**	99,32	0,68
II.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**13**	**%**	**248.580.400**	**13,00**	**%**	**238.126.250**	**100,00**	**95,79**	**4,21**
H.	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	***30***	***PSKS***	***248.580.400***	***30,00***	***PSKS***	***238.126.250***	***100,00***	***95,79***	***4,21***
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	18	Orang	130.783.000	18	Orang	128.962.000	100,00	98,61	1,39

	Kewenangan Kabupaten/Kota								
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500	Keluarga	60.297.400	500	Keluarga	51.692.500	100,00	85,73	14,27
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Lembaga	57.500.000	12	Lembaga	57.471.750	100,00	99,95	0,05
III.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**100**	**%**	**1.126.951.330**	**93,93**	**%**	**1.067.833.645**	**93,93**	**94,75**	**(0,82)**
I.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***	***1260***	***orang***	***288.859.750***	***1160***	***orang***	***268.308.250***	***92,06***	***92,89***	***(0,82)***
25	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1260	orang	288.859.750	1160	orang	268.308.250	92,06	92,89	(0,82)
J.	***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial***	***585***	***orang***	***838.091.580***	***573***	***orang***	***799.525.395***	***97,95***	***95,40***	***2,55***
26	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	500	orang	746.099.100	488	orang	708.171.965	97,60	94,92	2,68
27	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	85	orang	91.992.480	85	orang	91.353.430	100,00	99,31	0,69

	HIV/AIDS dan NAPZA								
IV.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**100 %**	**646.560.000**	**99,91 %**		**605.965.500**	**99,91**	**93,72**	**6,19**
K.	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	***100 %***	***646.560.000***	***99,91 %***		***605.965.500***	***99,91***	***93,72***	***6,19***
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3000 orang	215.000.000	3000 orang		183.121.000	100,00	85,17	14,83
29	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1398 keluarga	351.560.000	1398 keluarga		350.086.000	100,00	99,58	0,42
30	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	40 Keluarga	80.000.000	36 Keluarga		72.758.500	90,00	90,95	(0,95)
V.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**100 %**	**585.000.000**	**99,63 %**		**420.975.590**	**99,63**	**71,96**	**27,67**
L.	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	***100 %***	***550.000.000***	***99,63 %***		***409.661.590***	***99,63***	***74,48***	***25,15***
31	Penyediaan Makanan	6165 orang	550.000.000	6165 orang		409.661.590	100,00	74,48	25,52
		582 orang	550.000.000	557 orang					-
M.	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***	***100 %***	***35.000.000***	***100,0 %***		***11.314.000***	***100,00***	***32,33***	***67,67***
32	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	29 orang	35.000.000	29 orang		11.314.000	100,00	32,33	67,67
VI.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**100 %**	**61.976.150**	**100 %**		**61.868.944**	**100,00**	**99,83**	**0,17**
N.	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***	***1 Unit***	***61.976.150***	***1 Unit***		***61.868.944***	***100,00***	***99,83***	***0,17***
33	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	50 makam	25.800.000	50 makam		25.793.944	100,00	99,98	0,02
34	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 laporan	36.176.150	2 laporan		36.075.000	100,00	99,72	0,28

	JUMLAH		**7.731.627.026**		**7.360.808.629**	**98,91**	**95,20**	**3,71**

Berdasarkan penyajian data pada tabel 3.10 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Dari 6 enam program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Program Penanganan Bencana menunjukkan tingkat efisiensi paling tinggi. Yaitu sebesar 27,67%. Hal ini dikarenakan capaian *Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota* dan *Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota* masuk kategori *Sangat Tinggi.* Dengan adanya dukungan lintas sektor dalam penanganan bencana.
b. Program Rehabilitasi Sosial menunjukkan tingkat efisiensi terendah/tidak ada efisiensi meskipun secara capaian Kegiatan/sub kegiatan yang mendukung Program Rehabilitasi Sosial masuk kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan, adanya bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang tidak tersalurkan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian NIK, pindah alamat, meninggal dunia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS SOSIAL Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS SOSIAL Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS SOSIAL dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 DINAS SOSIAL menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan Meningkatkan PPKS yang tertangani terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Capaian SPM Bidang Urusan Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.731.627.026 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.360.808.629, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,91% dengan serapan anggaran sebesar 95,20% dan tingkat efisiensi sebesar 3,71%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS SOSIAL ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS SOSIAL kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS SOSIAL
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 05 Telp/ Fax. (031) 3095361
B A N G K A L A N **Kode Pos 69116**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 00.7.2.7/ 56 /Kpts/433.105/2024

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D;

10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomo 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 18/E);
13. Peraturan Bupati Bangkalan No 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 16 Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS SOSIAL

WIBAGIO SUHARTA , S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024 - 2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan di bidang sosial
FUNGSI	:	a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
TUJUAN	:	1. Meningkatkan PPKS yang tertangani

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan
Nomor : 00.7.2.7/ /Kpts/433.105/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
A	Meningkatkan PPKS yang tertangani		Persentase PPKS yang tertangani	persentase	Mengukur persentase PPKS yang tertangani (mendapatkan pelayanan sosial)	Jumlah PPKS yang tertangani / Jumlah PPKS yang dilaporkan x 100%	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial;
1		Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	1.1 Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	persentase	Mengukur rata-rata capaian SPM urusan sosial kewenangan Kabupaten/kota	(X1+X2+...+Xn) / n X = jumlah capaian SPM Urusan Sosial kewenangan kabupaten/kota; n = Jumlah data	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2		Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persentase	Mengukur persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaporkan x 100	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial; 4. Bidang Pengembangan Sosial
3		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.	Hasil kuesioner/ survey kepuasan masyarakat	Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kab. Bangkalan
			3.2 Nilai SAKIP	Nilai	Mengukur tingkat Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Inspektorat

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Target Capaian Indikator	Target Capaian Tahun		
			2022	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	6,22%	6,22%	7,69%	9,16%
S1	Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	96%	100	100	100
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial	11,46%	13	14	15
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,55	87,75	88,5	90
		Nilai SAKIP	60,7	61,4	61,5	61,6

Bangkalan, 16 Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS SOSIAL

WIBAGIO SUHARTA, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730126 199302 1 001